

DINAMIKA POLITIK LOKAL DI UBUNG: ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DAN EKONOMI

I Made Gianendra Wikantara, Piers Andreas Noak, Gede Indra Pramana

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024

Revised September 2024

Accepted September 2024

Available online September 2024



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik lokal di Ubung dan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap perubahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan menerapkan metode kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian dokumen, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan memengaruhi perkembangan ekonomi serta struktur sosial di Ubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal namun juga menimbulkan tantangan seperti pergeseran kepemilikan tanah dan migrasi penduduk. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta perlunya sistem pemantauan yang lebih baik

untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki mekanisme evaluasi kebijakan.

Kata Kunci: Dinamika politik lokal, kebijakan pemerintah daerah, perubahan sosial, perubahan ekonomi, Ubung, Pembangunan Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan

Abstract

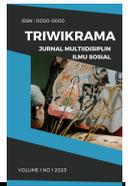
This research aims to understand the dynamics of local politics in Ubung and analyze the influence of local government policies on social and economic changes in the region. By applying qualitative methods including in-depth interviews, field observations, and document review, this research identifies how infrastructure development and environmental management policies influence economic development and social structure in Ubung. The research results show that this policy encourages local economic growth but also raises challenges such as shifts in land ownership and population migration. These findings underscore the importance of community involvement in policy making and the need for better monitoring systems to ensure policies implemented are in line with local needs. This research provides recommendations for increasing community participation and improving policy evaluation mechanisms.

Keywords: Local political dynamics, local government policies, social change, economic change, Ubung, infrastructure development, environmental management

PENDAHULUAN

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, dinamika politik lokal memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Ubung, sebuah kecamatan yang terletak di Bali, merupakan contoh yang menarik untuk mengeksplorasi hubungan ini karena karakteristik sosial dan ekonominya yang khas serta peran sentral kebijakan pemerintah daerah dalam proses perubahan yang sedang berlangsung.

Seiring dengan perkembangan pesat yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Ubung, pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada tantangan besar dalam merumuskan



dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan perubahan sosial yang mungkin timbul. Kebijakan publik, yang mencakup berbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan perencanaan kota, memiliki dampak yang mendalam terhadap struktur sosial dan pola ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi dan diimplementasikan serta bagaimana mereka memengaruhi kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam konteks Ubung, kebijakan pemerintah daerah telah dirancang untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam hal infrastruktur, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sering kali dipandang sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, pembangunan ini juga dapat menimbulkan dampak sosial, seperti perubahan dalam kepemilikan tanah dan pola migrasi penduduk, yang memerlukan perhatian dan manajemen yang cermat.

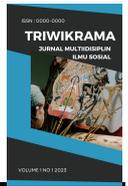
Pengelolaan lingkungan juga menjadi isu penting dalam kebijakan pemerintah daerah, terutama di daerah dengan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya seperti Bali. Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sering kali berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan sosial yang bertentangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini diterima, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat menjadi krusial.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang dinamika politik lokal di Ubung dan dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian dokumen, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan publik dan dampaknya pada masyarakat setempat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan mempengaruhi struktur sosial dan pola ekonomi di Ubung, serta bagaimana proses politik lokal mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat dirancang dan diterapkan secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi tentang cara mengelola perubahan sosial dan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari kebijakan publik, serta untuk memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik kebijakan publik yang lebih baik di tingkat lokal, khususnya di Ubung dan daerah-daerah serupa di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dinamika politik lokal di Ubung dan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan interaksi kompleks antara kebijakan publik dan dampaknya pada masyarakat. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus dengan fokus pada kecamatan Ubung. Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai dinamika politik lokal dan dampak kebijakan publik dalam konteks spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Ubung mempengaruhi perubahan sosial dan ekonomi dengan mengidentifikasi pola-pola dan mekanisme yang terlibat. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di Ubung, termasuk pejabat pemerintah daerah, anggota dewan lokal, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi

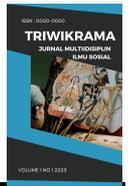


non-pemerintah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang perspektif dan pengalaman mereka terkait kebijakan pemerintah daerah serta dampaknya terhadap masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik-topik yang relevan yang muncul selama percakapan. Observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan dan interaksi sehari-hari di Ubung. Observasi ini melibatkan kunjungan ke berbagai lokasi yang terkena dampak kebijakan, seperti proyek infrastruktur, area pengelolaan lingkungan, dan fasilitas umum. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan dan bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut. Kajian dokumen meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan studi sebelumnya yang relevan dengan kebijakan publik dan perubahan sosial-ekonomi di Ubung. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks tambahan dan informasi yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi. Dokumen-dokumen ini juga membantu dalam mengidentifikasi kebijakan utama dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan kajian dokumen dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Metodologi ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap perubahan sosial dan ekonomi di Ubung, serta untuk menggali dinamika politik lokal yang memengaruhi proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak kebijakan infrastruktur terhadap perubahan sosial dan ekonomi meliputi pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Ubung, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan peningkatan fasilitas umum, telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan aksesibilitas, mengurangi biaya transportasi, dan mendorong investasi bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas jalan dan fasilitas transportasi mengakselerasi pergerakan barang dan jasa, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan memperluas peluang bisnis. Namun, dampak positif ini juga diiringi oleh tantangan sosial. Proyek-proyek infrastruktur sering kali mengakibatkan perubahan dalam pola kepemilikan tanah dan migrasi penduduk. Sejumlah penduduk harus berpindah dari lahan yang terdampak proyek, yang memicu ketegangan sosial dan konflik kepentingan antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat lokal. Pergeseran ini juga mempengaruhi struktur komunitas, dengan munculnya kelompok-kelompok baru dan perubahan dalam hubungan sosial di tingkat lokal, selanjutnya perubahan ekonomi, meliputi pembangunan infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang sektor-sektor lain, seperti perhotelan dan perdagangan. Studi menunjukkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga di daerah yang mengalami pembangunan infrastruktur signifikan. Namun, distribusi manfaat ekonomi tidak merata. Sebagian kelompok masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses ke modal dan jaringan bisnis, mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan kelompok lain yang lebih rentan secara ekonomi.

Pengaruh kebijakan pengelolaan lingkungan, dimana kebijakan pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah daerah di Ubung bertujuan untuk melindungi ekosistem lokal dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Ini termasuk upaya untuk mengurangi pencemaran, menjaga kualitas air, dan melestarikan area hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi pada perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan tingkat pencemaran di beberapa area. Kebijakan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan keberlanjutan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali terkendala oleh masalah praktis, seperti kurangnya dana dan kapasitas pengawasan. Di beberapa kasus, kebijakan tidak diterapkan secara konsisten atau tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada, menyebabkan ketidakefektifan dalam mencapai tujuan lingkungan yang diinginkan. Dampak ini sering kali mempengaruhi masyarakat yang



bergantung pada sumber daya alam, seperti petani dan nelayan, yang mengalami perubahan dalam pola hidup dan ketergantungan ekonomi. Kontradiksi antara ekonomi dan lingkungan, adanya konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi isu utama dalam implementasi kebijakan. Beberapa kebijakan yang dirancang untuk melindungi lingkungan juga mengandung konsekuensi ekonomi, seperti pembatasan kegiatan ekonomi di area tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara kelompok yang mendukung pelestarian lingkungan dan mereka yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat sering kali menghadapi dilema antara manfaat ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

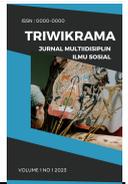
Peran dinamika politik lokal dipengaruhi oleh pengaruh aktor politik. Dinamika politik lokal di Ubung sangat mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Wawancara dengan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa aktor politik lokal, seperti pejabat pemerintah, anggota dewan, dan tokoh masyarakat, memiliki pengaruh besar dalam menentukan prioritas kebijakan dan alokasi sumber daya. Faktor-faktor politik sering kali mempengaruhi keputusan kebijakan, baik melalui dukungan atau penentangan terhadap proyek tertentu, serta alokasi dana dan sumber daya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sering kali terbatas. Banyak kebijakan yang diterapkan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat lokal, mengakibatkan kurangnya dukungan dan resistensi terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Interaksi kebijakan dan perubahan sosial antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan perubahan sosial di Ubung mencerminkan dinamika kompleks antara modernisasi dan pelestarian budaya. Meskipun pembangunan infrastruktur meningkatkan aksesibilitas dan potensi ekonomi, perubahan sosial yang ditimbulkan oleh proyek-proyek ini menunjukkan kebutuhan untuk perencanaan yang lebih inklusif. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan untuk meminimalkan dampak negative. Tantangan dalam pengelolaan lingkungan di Ubung menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya dan penegakan hukum. Meskipun kebijakan lingkungan bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup, implementasinya sering terhambat oleh masalah praktis dan ketidakcocokan antara kebijakan dan realitas lokal. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penguatan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum, serta pengaruh politik lokal terhadap kebijakan. Dinamika politik lokal di Ubung menunjukkan bahwa aktor politik memiliki peran kunci dalam membentuk dan menerapkan kebijakan. Pengaruh politik ini sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat dan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan, serta memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji dinamika politik lokal di Ubung dengan fokus pada analisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat Ubung, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

1. Perubahan Sosial: Kebijakan pemerintah daerah di Ubung telah menyebabkan transformasi dalam struktur sosial masyarakat. Program-program sosial yang diimplementasikan, seperti peningkatan infrastruktur dan layanan publik, berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup dan penguatan solidaritas sosial. Namun, ada juga



- tantangan terkait dengan ketidaksetaraan akses terhadap manfaat kebijakan, yang seringkali mempengaruhi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
2. Perubahan Ekonomi: Dari sisi ekonomi, kebijakan pemerintah daerah berdampak pada pengembangan sektor-sektor tertentu, seperti industri kecil dan menengah serta pariwisata lokal. Penurunan pengangguran dan peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan hasil positif dari kebijakan tersebut. Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan biaya hidup dan ketimpangan ekonomi antar wilayah.
 3. Keterlibatan Masyarakat: Terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan yang efektif. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan lokal, serta mengurangi potensi konflik sosial.
 4. Rekomendasi: Untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan inklusivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, evaluasi berkala dan umpan balik dari masyarakat harus menjadi bagian integral dari proses kebijakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki strategi yang ada.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah daerah di Ubung telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan sosial dan ekonomi, tetapi masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa manfaatnya merata dan tantangan yang ada dapat diatasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). **Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions, and Society**. Institute of Southeast Asian Studies.
- Bappeda Kabupaten Badung. (2022). **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2021-2026**. Pemerintah Kabupaten Badung.
- Boesten, J. (2015). **The Political Economy of Development in Indonesia**. Routledge.
- Hill, H. (2000). **The Indonesian Economy: Performance and Problems**. Cambridge University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). **Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- McLeod, R. H. (2019). **Local Governance and Development in Indonesia: The Case of Bali**. Springer.
- Rahardjo, R. (2018). **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Studi Kasus di Bali**. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(3), 45-60.
- Siahaan, A. (2021). **Politik dan Kebijakan Lokal di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah**. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Yuliana, L., & Hidayat, H. (2016). **Perubahan Sosial dan Ekonomi akibat Kebijakan Publik di Wilayah Perkotaan Indonesia**. Jurnal Studi Pemerintahan, 15(2), 101-118.